

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
DI KELURAHAN CIGADUNG KECAMATAN SUBANG**

Oleh :

Iwan Henri Kusnadi

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

iwanhenri01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Metode analisis dalam penelitian ini meliputi tiga yaitu reduksi, tampilan dan penarikan kesimpulan. Reduksi yaitu data yang dikumpulkan dipilih, disederhanakan, difokuskan, diabstraksikan dan ditransformasikan, tampilan yaitu data berupa teks naratif, matriks, kutipan, grafik ataupun bagan, tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa 1) Partisipasi masyarakat dalam partisipasi buah pikiran belum terlaksana, perancangan belum melibatkan masyarakat, tetapi hanya di wakili oleh Ketua RW dan Pihak Kelurahan yang membahas tentang program pengelolaan sampah di masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Cigadung, 2) partisipasi tenaga berupa gotong royong semua dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat setempat secara bergotong royong untuk mewujudkan kelurahan Cigadung dapat melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah lingkungan, 3) Partisipasi harta benda yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Cigadung kurang mendukung dengan program tersebut karena tidak mau membayar retribusi sampah, itu diperlihatkan tidak semua wilayah rukun warga target retribusinya tercapai. 4) Kesiediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. 5) Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah masih terdapat kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah, kendala tersebut disebabkan ‘kesadaran warga kurang’. Kesadaran tersebut lebih merujuk pada persepsi dan sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Persepsi dan sikap yang dapat mempengaruhi perilaku, sehingga perubahan perilaku memerlukan upaya perubahan persepsi dan sikap terlebih dahulu.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

This study examines and analyzes on Public Participation in Waste Management in Sub Cigadung District of Subang. The research approach used to assess on Public Participation in Waste Management in Sub Cigadung District of Subang is descriptive method with qualitative approach, the research procedure that produces descriptive data in the form of words written or spoken of people and behaviors that can be observed. This approach is directed at the individual background and holistic (whole). The method of analysis in this study included three of reduction, display and conclusion. Reduction in that the data collected is selected, simplified, focused, abstracted and transformed, ie the display of data in the form of narrative text, matrix, quotes, graphs or charts, the next stage is the conclusion.

The results of the study suggests that 1) Public participation in the ideas of participation has not been done, the design has not involve the community, but only represented by the Chairman of the RW and the Village Party that talks about waste management program in the community held in the Village Cigadung, 2) participation in the form of power mutual help all implemented with the involvement of local communities worked together to realize the village Cigadung can implement public participation in environmental waste management, 3) Participation of property made by the village community Cigadung less support to the program because they do not want to pay the levy garbage, it is shown not all neighborhoods retribution targets achieved. 4) The willingness of people to participate is a sign of the community's initial ability to develop independently. 5) Community participation in waste management, there are still obstacles in realizing people's participation to manage waste, the constraints due to 'lack of awareness of citizens'. The awareness refers to the perceptions and attitudes towards waste management. Perceptions and attitudes that affect the behavior, so it requires a behavioral change perceptions and attitudes change effort beforehand.

Keywords: Community Participation, Waste Management

PENDAHULUAN

Kota sebagai pusat aktivitas manusia memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang bermukim di pedesaan dan di sekitar kota tersebut, sehingga mereka termotivasi untuk datang ke kota yang menurut anggapan mereka kota menjanjikan masa depan yang lebih baik, menyebabkan tingkat arus urbanisasi semakin tinggi. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di kota maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan yang umum terjadi di perkotaan adalah pengelolaan sampah perkotaan yang

kurang baik. Sampah yang merupakan bagian sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit. Pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi. Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius di perkotaan akibat

kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Masalah yang sering timbul dalam penanganan sampah adalah tingginya tingkat pencemaran yang berasal dari sampah rumah tangga, pasar, rumah sakit, sekolah dan tempat-tempat umum lainnya. Tingginya tingkat pencemaran tersebut sebagai akibat makin padatnya penduduk dan makin meningkatnya aktivitas manusia sehingga volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat pula, sehingga terjadilah penumpukan sampah oleh karena volume sampah yang dapat di angkut dan di kelola tidak seimbang dengan volume produksi sampah. Penumpukan sampah tersebut tentunya mempunyai dampak yang negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga sangat diperlukan sistem pengelolaan persampahan yang memadai. Pelaksanaan pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi komponen-komponen yang mendukung yaitu aspek teknis, kelembagaan, hukum atau peraturan, pembiayaan maupun peran serta masyarakat

Sampah merupakan suatu bahan yang dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis dan perlu adanya pengelolaan agar tidak membahayakan lingkungan serta melindungi investasi pembangunan. Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang cukup serius, terutama pada tingkat perkotaan. Hal ini dikarenakan kualitas suatu kota dapat diukur dari kebersihannya yang menjadikan sampah sebagai tolak ukur.

Selain itu, kegiatan perkotaan yang kompleks juga menghasilkan jumlah sampah yang cukup besar dan lebih bervariasi. Permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab petugas kebersihan ataupun pihak-pihak tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 12 ayat 1 yaitu “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”. Sehingga, berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa setiap warga Negara Indonesia harus bertanggungjawab untuk ikut serta menanggulangi permasalahan sampah yang dihasilkan terutama sampah rumah tangga.

Penanganan sampah perkotaan pada prinsipnya adalah membersihkan kota dari sampah yang dihasilkan dan mengamankan sampah tersebut di pembuangan akhirnya agar tidak mencemari lingkungan. Sampah merupakan suatu penyakit kronis, semakin lama akan semakin membahayakan. Semakin dini dilakukan upaya penanggulangan masalah sampah maka semakin mudah dan murah (biaya). Penanganan sampah dimulai dari kesadaran masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Subang dalam hal ini Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Kebersihan lewat programnya yang terarah dan terpadu untuk mengelola sampah dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat untuk merumuskan teknis yang perlu diambil dalam penanggulangannya. Serta melibatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat yang terlibat secara langsung dalam aktivitas persampahan sehari-hari, mulai dari pembuangan sampah rumah tangga hingga model iuran dan penempatan akhir dari sampah-sampah tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan di daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perbaikan masalah sampah. Partisipasi yang terpenting adalah tahapan penerimaan masyarakat, baik secara mental maupun emosional dalam

situasi keberhasilan serta bertanggungjawab atas tanggapan ataupun penolakan terhadap program penanganan sampah/kebersihan kota. Aspek peran serta masyarakat menjadi salah satu kunci penting dari keberhasilan karena mengandung makna pengelolaan sampah merupakan upaya yang harus ditempuh oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan aspek yang lain yang lebih banyak diharapkan campur tangan dari Pemerintah karena terkait dengan pengaturan, sarana dan prasarana serta mekanisme yang cenderung menjadi tugas dan fungsi pemerintah di bidang pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang seberapa besar partisipasi dari masyarakat itu sendiri, karena partisipasi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang terjadi. Untuk dapat seseorang berpartisipasi, masyarakat perlu diberi pengertian atau pemahaman tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya, untuk apa hal tersebut perlu dilakukan, dimana akan dilaksanakan serta apa tugas dan tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaannya. Setelah masyarakat mengetahui fungsi serta peran dan makna yang diperoleh maka diharapkan akan bersedia untuk melaksanakan bahkan mau berkorban baik ide pemikiran, maupun material demi terwujudnya keinginan bersama yang diharapkan. Semakin banyak manfaat yang diperoleh oleh masyarakat pelaku, semakin kuat masyarakat tersebut akan terlibat dalam suatu program kegiatan dan pada gilirannya partisipasi dari masyarakat tersebut akan dapat meningkatkan usaha perbaikan lingkungan bagi masyarakat yang bersangkutan.

Kaitannya dengan pengelolaan sampah, kebijakan yang digunakan masih terkesan dan didasarkan pada pendekatan dari atas atau *top down*. Pendekatan ini mengandung arti bahwa komitmen pemerintah terhadap partisipasi masyarakat sangat terbatas. Oleh karena itu perlu dikembangkan konsep yang mendorong

berkembangnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat agar mampu mengatasi masalah sendiri dan sekaligus akan mengurangi ketergantungannya pada pemerintah. Pembangunan yang berbasis pada pendekatan *bottom up* dipandang sebagai salah satu alat untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh yang berlandaskan pada aspirasi dari tingkat bawah. Adapun kunci dari keberhasilan pendekatan *bottom up* yaitu keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap pembangunan. Dengan demikian peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan proses dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dari pengambilan keputusan tentang program dan kebijakan.

Pendekatan partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat pada pengelolaan sampah permukiman masyarakat, setiap komunitas atau masyarakat dalam suatu wilayah permukiman dan kelembagaannya dapat disetarakan dengan sebuah organisasi, sebab sistem pemilahan sampah memerlukan peran *block leader* dan kebersamaan seluruh anggota masyarakat dalam wilayah atau komunitas tersebut. Pertimbangan lainnya adalah bahwa kelompok masyarakat sebagai penggerak sistem pengelolaan sampah merupakan suatu bentuk kelembagaan yang ada dalam masyarakat yang memiliki struktur dan fungsi tertentu, sehingga pendekatan komunitas permukiman tersebut sebagai sebuah organisasi sangat relevan. Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan mengubah bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih. Perubahan bentuk perilaku masyarakat bisa terwujud, jika ada usaha membangkitkan masyarakat, dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku bahwa kebersihan tidak lagi didasarkan kepada kewajibannya, tetapi lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang bahwa partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah, rendahnya inisiatif partisipasi warga masyarakat untuk memecahkan masalah sampah hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut : Peserta rapat penanggulangan sampah di Kelurahan Cigadung Kabupaten Subang hanya di hadiri oleh $\pm 30\%$ pengurus RW dan RT di wilayah kerja Kecamatan Cigadung, Kerja bakti pembersihan sampah hanya dilakukan oleh $\pm 15\%$ warga dan kurangnya bak penampungan sampah sementara, yang idealnya 1 RT terdapat satu TPS pada kenyataannya hanya 1 TPS setiap RWnya

METODE

Dalam penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (Moleong, 2010 : 131). Menurut Nazir (2009 : 54) bahwa metode deskriptif adalah adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut keirl dan Miller dalam Moleong (2010 : 132) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan,

manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan perisylahannya.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh (Moleong, 2010 : 138) adalah :

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode kualitatif secara tidak langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden.
3. Metode kualitatif lebih peka dan menyesuaikan diri dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang

Dewasa ini masalah sampah merupakan salah satu masalah serius dalam lingkungan hidup diseluruh dunia dan kaitannya sangat erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Semua orang tidak bisa terlepas dengan masalah sampah, sebagai pihak yang menghasilkan sampah. Maka boleh dikatakan masalah sampah adalah masalah persepsi masyarakat mengenai sampah. Dengan makin bertambahnya jumlah penduduk makin bertambah pula volume sampah yang dihasilkan. Dengan demikian, perlu lebih banyak tempat pembuangan akhir (TPA). Ironisnya, jumlah penduduk yang semakin bertambah justru mengurangi TPA karena konservasi lahan menjadi daerah pemukiman, sementara penduduk atau pemerintah daerah kurang menaruh

perhatian terhadap masalah sampah tersebut. Keadaan tersebut diperburuk oleh kemajuan yang tidak hanya menghasilkan jumlah sampah yang makin besar volumenya, tapi juga sifat (*characteristic*) yang makin berbahaya. Di negara-negara maju, kebanyakan sampah diolah dengan dibakar, supaya meminimalkan volume sampah yang menuju ke TPA. Akan tetapi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, biasanya sampah yang dikumpulkan hanya dibuang ke TPA tanpa diolah terlebih dahulu.

Penanganan sampah perkotaan pada prinsipnya adalah membersihkan kota dari sampah yang dihasilkan dan mengamankan sampah tersebut di pembuangan akhirnya agar tidak mencemari lingkungan. Sampah merupakan suatu penyakit kronis, semakin lama akan semakin membahayakan. Semakin dini dilakukan upaya penanggulangan masalah sampah maka semakin mudah dan murah (biaya). Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan pengelolaan persampahan di daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perbaikan masalah sampah. Partisipasi yang terpenting adalah tahapan penerimaan masyarakat, baik secara mental maupun emosional dalam situasi keberhasilan serta bertanggungjawab atas tanggapan ataupun penolakan terhadap program pengelolaan persampahan.

Partisipasi masyarakat sering diartikan keikutsertaan, keterlibatan dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan adalah keterlibatan masyarakat dalam ikut serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung secara individu, keluarga, kelompok masyarakat sejak proses perencanaan penanganan sampah sampai akhirnya pada tahapan implementasi serta monitoring dan evaluasi. Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat

dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan terdapat lima tahap dalam partisipasi masyarakat, yaitu: Partisipasi buah pikiran, Partisipasi tenaga, Partisipasi harta benda, Partisipasi keterampilan dan Kemahiran, Partisipasi sosial. Kelima aspek tersebut dapat dilihat melalui serangkaian uraian hasil penelitian sebagai berikut

Partisipasi Buah Pikiran

Partisipasi buah pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya, contohnya adalah anjang sono, pendapat, pertemuan atau rapat. Masyarakat ikut serta secara aktif dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Bentuk partisipasi yang dimaksud ialah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi diantaranya bentuk-bentuk partisipasi: partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta

dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Pengelolaan persampahan adalah suatu pendekatan partisipatif yang mengajak masyarakat untuk mengalisa kondisi sanitasi mereka melalui suatu proses pemicuan, sehingga masyarakat dapat berpikir dan mengambil tindakan untuk meninggalkan kebiasaan buang sampah mereka yang masih di sembarang tempat. Pendekatan yang dilakukan dalam pengelolaan persampahan menimbulkan rasa malu kepada masyarakat tentang kondisi lingkungannya. Melalui pendekatan ini, kesadaran akan kondisi yang sangat tidak bersih dan tidak nyaman di timbulkan. Dari pendekatan ini juga ditimbulkan kesadaran bahwa pengelolaan persampahan adalah masalah bersama karena dapat berimplikasi kepada semua masyarakat sehingga pemecahannya juga harus dilakukan dan dipecahkan secara bersama.

Pengelolaan sampah adalah sebagai upaya terpadu untuk menjaga kebersihan lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh semua pemegang peran atau *stakeholder* baik pemerintah sesuai bidang tugas masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan yang berbasiskan masyarakat selaku *stakeholder* menjadi penting. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa dengan perencanaan yang berbasiskan masyarakat maka program pengelolaan lingkungan hidup akan menjadi harmonis, berdaya guna dan berhasil guna sekaligus sebagai wahana untuk mewujudkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan dari bawah atau *bottom up planiing*. Selain daripada itu, proses *bottom up planning* tersebut diharapkan dapat melengkapi proses perencanaan pembanguna yang telah ada selama ini. Prinsip pendekatan program

pengelolaan sampah di masyarakat adalah non subsidi. Masyarakat akan dibangkitkan kesadarannya bahwa masalah sampah adalah masalah masyarakat sendiri dan bukan masalah pihak lain. Dengan demikian yang harus memecahkan permasalahan sampah adalah masyarakat sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Tata Ruang Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten Subang yang di wawancarai oleh penulis : Pemerintah Kabupaten Subang yang diwakili oleh Tenaga Fasilitator Teknik dan beberapa orang dari Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang mengadakan kunjungan lapangan untuk melakukan *shortlist* (daftar pendek) sesuai dengan persyaratan teknis dan sosial yang telah diterapkan. Dari hasil *shortlist* tersebut diketahui bahwa ada lokasi yang memenuhi syarat baik secara teknis maupun sosial yang layak untuk dibuatkan TPS di tunjuk beberapa tempat yang ada di Kecamatan Subang. Untuk wilayah yang ada di Kelurahan Cigadung yang terpilih untuk dibangun TPS, masyarakat di wilayah tersebut diberikan sosialisasi tentang pengelolaan TPS terlebih dahulu secara detail, sehingga masyarakat dapat memutuskan dengan pertimbangan yang matang. Dari hasil wawancara tersebut terlihat, bahwa pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Tata Ruang Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten Subang dengan sungguh-sungguh ingin meningkatkan kebersihan lingkungan di masyarakat dan merubah kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah di sembarang tempat, seperti di kebun, sungai dan bahkan dilahan terbuka disekitar rumah tinggal. Berbagai program telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, namun hasilnya masih belum menunjukkan hal yang menggembirakan.

Partisipasi masyarakat secara sederhana bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti seseorang,

kelompok atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi. Bentuk partisipasi yang dimaksud ialah macamnya sumbangan yang diberikan seseorang, kelompok atau masyarakat yang berpartisipasi diantaranya bentuk-bentuk partisipasi: partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran. Seperti halnya hasil wawancara penulis dengan Lurah Cigadung Kecamatan Subang mengenai pertemuan dengan warga masyarakat atau tokoh masyarakat saat program pengelolaan sampah masyarakat di wilayah Kelurahan Cigadung sebagai partisipasi buah pikiran : Ada, yaitu setelah adanya sosialisasi dari Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang mengenai akan dibangun TPS atau ditempatkannya bak sampah di wilayah Kelurahan Cigadung yang nantinya dikelola oleh masyarakat, hal yang dimusyawarahkan mengenai penentuan lokasi, dan pembentukan pengelola petugas penarik sampah.

Pembuatan keputusan bersama antara pihak kelurahan dan masyarakat bukan sebagai penggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat mempengaruhi hasil/keputusan. Kalau pembuat keputusan masyarakat tidak dilibatkan maka akan terjadi kerancuan yang berdampak negatif rasa kepedulian dan kepemilikan tidak ada. Partisipasi masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai

obyek tetapi juga subyek yang menjalankan program yang direncanakan bersama.

Sementara hasil wawancara penulis dengan perwakilan masyarakat Kelurahan Cigadung mengenai sejak kapan dilaksanakannya program pengelolaan persampahan, apakah dapat merubah pola hidup masyarakat yang dulunya terbiasa membuang sampah ke sungai atau tempat terbuka ini : Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui di wilayah Kelurahan Cigadung ada yang dibuatkan TPS atau ditempatkannya Bak Sampah, bahkan masyarakat kurang familiar dengan istilah program partisipasi pengelolaan sampah di masyarakat. Belum adanya rapat yang diadakan oleh masyarakat yang membahas tentang program partisipasi pengelolaan sampah di masyarakat, rapat baru diadakan oleh perangkat kelurahan, para Ketua RW dan belum melibatkan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sebagian masyarakat Kelurahan Cigadung, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu partisipasi pengelolaan sampah di masyarakat. Maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tata Ruang Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten Subang harus lebih banyak memberikan sosialisasi atau penerangan kepada masyarakat Kelurahan Cigadung mengenai program partisipasi pengelolaan sampah di masyarakat serta manfaatnya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat. Berdasarkan fungsi perencanaan tersebut, maka perencanaan adalah keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bilamana akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan. Jelasnya perencanaan dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu dalam waktu yang akan datang, dan usaha/cara yang efektif untuk pencapaiannya. Oleh karena itu perencanaan adalah suatu keputusan apa yang diharapkan dalam waktu yang akan datang.

Tahap perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses pelaksanaan

program pembangunan pengelolaan sampah, hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan akan memberikan arah, langkah atau pedoman dalam proses pembangunan dimaksud. Pada tahapan ini akan ditelusuri aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat, dimulai dari keterlibatan mereka dalam menyusun rencana program yang diaktualisasikan melalui keaktifannya pada setiap rapat, inisiatif diadakannya rapat, keterlibatan dalam memberikan pendapat, tanggapan masyarakat serta pengembang terhadap upaya pengelolaan sampah, sampai dengan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan program yang direncanakan. Penyusunan perencanaan pengelolaan sampah di masyarakat merupakan suatu proses kesinambungan, sebagai satu proses dalam penyusunan perencanaan kawasan kebersihan lingkungan dibutuhkan suatu tindakan pemeliharaan yang terbaik/menguntungkan dari berbagai alternatif dalam usaha pencapaian tujuan. Mengingat perencanaan pengelolaan sampah di masyarakat lebih banyak melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, maka bentuk perencanaannya lebih menitik beratkan kepada *Community Based Tourism*. Pendekatan partisipatif merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat (*people centred development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal dalam mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dari dengan atau oleh masyarakat desa yang dikenal sebagai satu pendekatan *Participatory Planning* dapat diartikan sebagai metode yang memungkinkan masyarakat untuk saling berbagi meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan lingkungan, membuat rencana dan bertindak.

Program pengelolaan sampah di masyarakat yang bertumpu pada masyarakat merupakan suatu alternatif baru untuk meningkatkan tingkat kesehatan

masyarakat. Perencanaan partisipatif dapat dilakukan jika praktisi pembangunan tidak berperan sebagai perencanaan untuk masyarakat tetapi sebagai pendamping dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi buah pikiran belum terlaksana, perancangan belum melibatkan masyarakat, tetapi hanya di wakili oleh Ketua RW dan Pihak Kelurahan yang membahas tentang program pengelolaan sampah di masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Cigadung yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan persampahan dengan melakukan pemetaan kondisi TPS yang ada masyarakat, masalah yang mereka hadapi serta kebutuhan memecahkan masalah persampahan secara cepat dan dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat setempat.

Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya. Mendukung program pemerintah dalam upaya pengembangan pengelolaan sampah di masyarakat. Jadi partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar

orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara. Pengembangan program pengelolaan sampah di masyarakat yang berdasar pada ciri khas setempat, merupakan salah satu rancangan untuk menjaga kesehatan lingkungan masyarakat, namun membina tata cara yang terbaik untuk membuat keputusan itu adalah masalah yang lain. Hal ini membawa kepada isu penting lainnya dalam pemodelan pengelolaan persampahan untuk pembangunan pemukiman masyarakat yang berkelanjutan yaitu mendorong keikutsertaan masyarakatnya, agar hasil pembangunan TPS dan penempatan bak sampah yang berkelanjutan dapat efektif.

Strategi melibatkan peran serta masyarakat setempat bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat setempat tentang apa yang akan terjadi dan menjaga dialog dengan mereka; menghargai pendapat dan melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan; meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan kebersihan lingkungan serta dampaknya terhadap daerah setempat; mendorong hubungan antara kebersihan lingkungan dan penduduk setempat; dan melindungi masyarakat setempat dari dampak kegiatan pengelolaan sampah.

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang, mengenai masyarakat Kelurahan Cigadung apakah mendukung kegiatan program pengelolaan

sampah di masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten Subang. Alhamdulillah masyarakat menyambut baik program pengelolaan sampah di masyarakat tersebut, sehingga proses persiapan sampai pelaksanaan dapat terlaksana. Namun, untuk urusan pemeliharaan dan penggunaan/pemanfaatannya itu sudah di limpahkan kepada pihak pengelola, mudah-mudahan masyarakat disana tidak hanya antusias dalam perencanaan program dan pelaksanaannya saja tetapi penggunaannya juga sehingga apa yang menjadi tujuan dari pengelolaan sampah di masyarakat dapat bermanfaat

Pendekatan manajemen global adalah pendekatan manajemen terpadu yang membantu dalam menyalurkan energi masyarakat kedalam proses kemandirian yang maju, dengan demikian memberdayakan masyarakat menganalisis keadaan mereka sendiri, menghasilkan jalan keluar bagi masalah mereka, merencanakan pembangunan daerah mereka sendiri, dan menilai hasil-hasilnya. Pendekatan ini memberikan sarana untuk menelaah setiap keadaan secara bersistem dan mensistem. Seperti halnya yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten di Kelurahan Cigadung, untuk menarik minat masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah cukup mendukung, meskipun tidak semua masyarakat mengerti mengenai manfaat pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat Kelurahan Cigadung mengenai apakah masyarakat selalu ikut serta setiap diadakan kegiatan kerja bakti/gotong royong untuk pengelolaan sampah di masyarakat yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat setempat: Belum ada kerja bakti yang melakukan pekerjaan membuat tempat sampah sementara, dan melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan yang sifatnya rutin, karena masyarakat kurang mendapat sosialisasinya

dari pihak Dinas Tata Ruang Pemukiman dan Kebersihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat Kelurahan Cigadung mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, bahwa masyarakat Kelurahan Cigadung sudah mendukung adanya program pengelolaan sampah oleh masyarakat, itu dilihat dari masyarakat yang antusias dalam gotong royong dalam pengembangan kebersihan lingkungan

Hal ini dilakukan dengan pendekatan sistem holistik yang berdasar pada strategi dan metodologi perencanaan yang jelas yang merinci urutan peristiwa yang mengarah kepada penerapan dan penilaian hasil-hasilnya. Pendekatan Manajemen Global ini menjawab kebutuhan akan perencanaan serentak bagi kegiatan yang bertujuan banyak yang diperlukan dalam strategi pengelolaan daerah terpadu. Dengan pendekatan holistik, Pendekatan manajemen global ini menjamin perubahan kegiatan pengelolaan sampah yang dikelola oleh masyarakat berlangsung sejajar dengan perkembangan kegiatan sektor serta pembangunan lembaga administrasi dan sosialnya yang sesuai. Bila pemerintah dapat mengakomodasikan keinginan masyarakat, namun bila proses perencanaan tidak melalui identifikasi masalah serta tidak dimanfaatkannya masyarakat sebagai *local expert* untuk duduk bersama melakukan dialog, maka akan terjadi persoalan baru yaitu degradasi lingkungan akibat pencemaran yang pada gilirannya keseimbangan ekologis menjadi terganggu serta dari sisi ekonomi terjadi pemborosan sumberdaya. Dengan demikian aksi kolektif (*collective action*) sebagaimana pendapat dari Oslon (1995) bahwa pendekatan ini tidak hanya tergantung pada keuntungan (*benefit*) yang dapat diperoleh anggota suatu kelompok masyarakat namun ditentukan pula oleh kebersamaan kepentingan, ide dan rasional dari suatu kelompok. Dilain pihak praktek ini juga tidak sejalan dengan tahapan perencanaan yang dimulai dengan identifikasi masalah,

formulasi tujuan, analisis situasi, inventrisasi alternatif kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, implementasi dan pemantauan (Hadi, 2005)

Pemetaan konsep yang dipakai pada tahap pemunculan gagasan dan pemecahan masalah, memberikan bentuk pengambilan keputusan yang demokratis di dalam dinamika proses kelompok yang melenyapkan kemungkinan adanya ancaman dan dominasi anggota kelompok, dan pada saat yang sama memberikan suasana saling percaya dan saling memahami, meningkatkan keikutsertaan kelompok, kepemimpinan bersama dan pengawasan setempat, serta inovasi kreatif dan keluwesan. Dua unsur penting dalam pengembangan kewirausahaan yang dianggap sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi yang modern yaitu : Mengatur pengalokasian sumber daya dari pemanfaatan yang kurang produktif menjadi yang lebih produktif; dan diperlukan untuk memungkinkan penyesuaian kepada situasi yang baru dan belum dapat diramalkan. Dengan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, partisipasi tenaga berupa gotong royong semua dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat secara bergotong royong untuk mewujudkan kelurahan Cigadung dapat melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah lingkungan masyarakat guna mengembangkan tingkat pola hidup sehat di masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan, sehingga Kelurahan Cigadung dapat menjadi kelurahan yang kondisi lingkungan sehat.

Partisipasi Harta Benda

Aspek partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya. Masyarakat berperan aktif dalam penciptaan dan penggalan sumber-sumber yang dapat dikembangkan sebagai potensi budaya dan pariwisata. Pada

gilirannya, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan. antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Menurut beberapa sumber, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat. Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat itu berkembang secara mandiri ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dan perlu dibedakan. Masyarakat yang mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri bisa membangun dengan atau tanpa berpartisipasi vertikal dengan pihak lain.

Kemampuan yang dimaksud dapat ditumbuhkan. Secara garis besar menyatakan bahwa partisipasi (*vertical*) masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dapat memangkitkan rasa percaya pada kemampuan sendiri (*self reliance*) masyarakat. Rasa ini mendorong tumbuhnya prakarsa dan kegiatan bersama, dan dengan demikian partisipasi horisontalpun salah satu kualitas masyarakat yang mandiri, tergerak. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Tata Ruang Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten Subang, mengenai apakah masyarakat Kelurahan Cigadung merelakan sebagian harta bendanya atau tanahnya digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah. Salah satu komponen dalam

pengelolaan sampah adalah biaya atau anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan peralatan. Pemerintah Kabupaten Subang telah menetapkan retribusi sesuai dengan wilayah. Khususnya untuk Kelurahan Cigadung penerimaan retribusi yang berhasil di pungut oleh petugas masih belum mencapai target, hal ini kesadaran masyarakat dalam hal membayar retribusi sampah masih kurang. Partisipasi harta benda yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Cigadung untuk mendukung pengembangan pengelolaan sampah masih ada yang kurang mendukung dengan program tersebut, terbukti dari hasil wawancara tersebut, bahwa masyarakat Kelurahan Cigadung masih ada yang tidak mau merelakan harta bendanya, berupa membayar retribusi sampah, itu diperlihatkan tidak semua wilayah rukun warga target retribusinya tercapai.

Hasil wawancara penulis dengan Lurah Cigadung tentang bagaimana pelaksanaan program pengelolaan sampah di masyarakat tersebut, aparat kelurahan turut andil dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah di masyarakat. Pihak kelurahan selalu berkoordinasi dengan Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Tata Ruang Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten Subang, mengenai kegiatan apa saja yang ada Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Tata Ruang Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten Subang yang berhubungan dengan pengembangan kebersihan lingkungan, khususnya untuk Kelurahan Cigadung. Kendala yang dirasakan dalam melaksanakan program pengelolaan sampah di Kelurahan Cigadung adalah : Masyarakat belum memahami tentang pengelolaan sampah, Masyarakat belum memahami menjaga kesehatan lingkungan, masih membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi sampah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan pengelolaan sampah dilihat dari partisipasi harta benda, masih ada masyarakat yang belum mendukung dan merasa keberatan harta benda miliknya diserahkan untuk menunjang pengelolaan sampah di lingkungannya. Maka meskipun setiap warga sudah melaksanakan pembayaran retribusi kebersihan sampah rumah tangga, persoalan kebersihan lingkungan tidak semata-mata tugas dari para pengangkut sampah tetapi memerlukan banyak dukungan dan peran serta masyarakat sebagai produsen. Memenuhi kewajiban dalam membayar retribusi bulanan sampah bukan merupakan jaminan bagi terlaksananya lingkungan yang bersih dari sampah rumah tangga. Terlebih lagi bila lokasi pemukiman masyarakat tidak terdapat TPS maupun TPA dengan kondisi permanen yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Subang. Dalam penanganan sampah, aspek pembiayaan merupakan faktor yang menentukan terhadap keberhasilan. Komponen utama dalam pembiayaan pengelolaan sampah meliputi biaya pengadaan kendaraan pengangkutan (truk dan gerobak), operasional dan perawatan kendaraan, tenaga kerja (sopir, penyapu jalan, pengangkut sampah, pengawas dan pegawai administrasi) serta sistem pembuangan akhir sampah. Jumlah kendaraan dan tenaga kerja sangat tergantung dari luasnya lokasi dan volume sampah yang dikelola serta kondisi TPS (Tempat Pengumpulan Sementara)

Rasa tanggung jawab sebagai salah satu kualitas masyarakat yang berkemampuan berkembang secara mandiri tumbuh tatkala yang bersangkutan secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui suatu hal, menyerap suatu nilai, atau menerima suatu tugas, berkesempatan untuk belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan menjadi hal yang lebih besar, mempunyai kemampuan sendiri (*self confidence*), menentukan memutuskan sendiri apa yang

dikehendakinya. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berkorelasi positif dengan kemampuannya untuk berpartisipasi dan juga dengan kemampuannya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Diperlukan adanya sekelompok kecil masyarakat yang menjadi penggerak dan membawa perubahan terhadap kondisi pengembangan pengelolaan sampah di Kelurahan Cigadung dengan memberikan motivasi terhadap masyarakat yang lain dengan memberikan penyuluhan mengenai hal-hal yang dibutuhkan masyarakat seperti sadar lingkungan, pemanduan serta *hygiene* dan sanitasi, yang dilakukan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai partisipasi harta benda diperoleh beberapa informasi bahwa sebagian besar dari warga yang diwawancarai masih belum paham mengenai program pengelolaan sampah dan sadar lingkungan antusias masyarakat terhadap pengembangan pengelolaan sampah masih kurang dikarenakan mereka merasa bahwa Kelurahan Cigadung tidak memiliki daya tarik apapun untuk dikembangkan sebagai pengembangan program pengelolaan sampah, sehingga mereka kurang termotivasi untuk ikut serta dalam pengembangan tersebut. Walaupun tekad pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berlandaskan partisipasi rakyat sudah ada tetapi dilapangan, tekad tersebut belum dapat terwujud dengan sempurna. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa rendahnya pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah adalah kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam membangun prasarana wilayahnya yang potensial memberikan masukan (*input*) bagi pertumbuhan ekonominya, salah satunya pembangunan sarana pengelolaan sampah di masyarakat.

Melalui penelitian ini peneliti mencari bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Cigadung terhadap program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat. Apakah terdapat sikap yang mendukung

atau tidak yang akan mempengaruhi perkembangan kebersihan lingkungan ke daerah ini. Dan apakah masyarakat ikut berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kebersihan lingkungan di Kelurahan Cigadung. Hal ini perlu sekali diperhatikan, karena didalam pelaksanaan pembangunan pengelolaan sampah lingkungan, tanpa adanya peran serta masyarakat pembangunan itu tidak akan terlaksana dengan baik dan belum tentu pembangunan itu diterima masyarakat setempat.

Jadi pembangunan pengelolaan sampah lingkungan bukan hanya sebagai proyek pemerintah. Tapi masyarakat juga harus menganggap bahwa proyek pemerintah itu harus sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tapi yang paling penting adalah masyarakat dianggap sebagai subjek pembangunan. Mereka juga dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sanitasi lingkungan mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan dari pembangunan pengelolaan sampah lingkungan itu sendiri.

Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran

Partisipasi keterampilan dan kemahiran adalah yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri. Masyarakat berperan aktif dalam menggalakan segi positif yang berupa kegiatan yang memiliki sikap langsung maupun tidak langsung bermanfaat bagi pengembangan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Masyarakat menuntut meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelaksanaan program pengelolaan sampah. Partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Adakalanya kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tentu saja

partisipasi seperti ini suatu merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Pembangunan sarana prasarana sampah lingkungan berbasis masyarakat tidak terlepas dari adanya peran *stakeholders* yakni pemerintah daerah, masyarakat. Permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Tata Ruang Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten Subang ataupun pihak-pihak tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Pasal 12 ayat 1 yaitu “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”. Sehingga, berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa setiap warga Negara Indonesia harus bertanggungjawab untuk ikut serta menanggulangi permasalahan sampah yang dihasilkan terutama sampah rumah tangga.

Pembangunan sarana prasarana sampah harus memperhatikan faktor lingkungan agar kelestarian alam dapat terjaga. Pembangunan sarana prasarana sampah lingkungan yang sangat berpolarisasi dapat menimbulkan masalah terhadap lingkungan yang besar. Misalnya polusi air dan udara, kekurangan air, dan kerusakan dari pemandangan alam yang tradisional, hal ini mengurangi kualitas hidup dari masyarakat setempat. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Tata Ruang Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten Subang, mengenai apakah ada pengarahan kepada masyarakat dari pemerintah lokal dalam melakukan pengelolaan sampah lingkungan. Untuk pengelolaan persampahan di lingkungan masyarakat, Dinas tidak melakukan pelatihan secara khusus, cuba pengarahan mengenai tata cara pengelolaan TPS dan penggunaan roda sampah yang dibagikan kepada warga untuk mengangkut sampah rumah tangga ke TPS.

Tujuan pemberian pengarahan tersebut adalah untuk mengetahui apa pendapat sebagian masyarakat khususnya di Kelurahan Cigadung mengenai pengelolaan persampahan lingkungan. Dengan kegiatan ini pula diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang tidak terlihat yang selama ini dialami oleh masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Cigadung yaitu kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih masyarakatnya. Hasil wawancara penulis dengan perwakilan masyarakat Kelurahan Cigadung mengenai apakah masyarakat pernah mendapat pengarahan yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan lingkungan yang diadakan oleh Dinas terkait : Sebagian besar masyarakat Kelurahan Cigadung belum mendapat pengarahan dari pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan di lingkungan masyarakat, hanya yang mendapat pengarahan hanya pengurus desa dan para ketua RW belum mencakup kepada masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat Kelurahan Cigadung mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan di masyarakat dilihat dari partisipasi keterampilan dan kemahiran, bahwa yang pernah mengikuti pelatihan atau pengarahan tentang pengelolaan persampahan di masyarakat adalah tidak semua masyarakat mengikuti tetapi hanya perwakilan dari masyarakat yang diwakili oleh para Ketua RW dan perangkat Desa, jadi sebagian besar masyarakat belum pernah mengikuti pengarahan tersebut.

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu merupakan sesuatu yang seharusnya karena hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat adalah untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Dalam hal ini pemerintah memberi bantuan, sedangkan masyarakat harus memberikan respon dalam bentuk partisipasi secara aktif dalam proses pembangunan tersebut. Masyarakat hanya dapat diharapkan ikut

ambil bagian dalam suatu kegiatan adalah bila yang bersangkutan merasa dirinya berkepentingan dan diberi kesempatan untuk ambil bagian. Dengan kata lain partisipasi tidak mungkin optimal jika diharapkan dari mereka yang merasa tidak berkepentingan terhadap suatu kegiatan, dan juga tidak optimal jika mereka yang berkepentingan tidak diberi keleluasaan untuk ambil bagian.

Orang harus bisa berpartisipasi, dan didukung dalam berpartisipasinya. Hal ini berarti bahwa isu-isu seperti transportasi, keamanan, waktu dan lokasi kegiatan serta lingkungan tempat kegiatan dilaksanakan sangatlah penting dan perlu diperhitungkan dalam perencanaan proses-proses yang berbasis masyarakat. Kegagalan melakukan hal tersebut akan berakibat beberapa bagian dari masyarakat (biasanya perempuan dan etnis atau ras minoritas) tidak dapat berpartisipasi, meskipun mereka sangat menginginkannya. Partisipasi masyarakat berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam mengambil keputusan. Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat. Kesiediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Penyusunan rotasi jadwal pengangkutan sampah yang tepat dapat menjamin terangkutnya semua sampah tepat pada waktunya, sampah yang tidak berserakan akan mempermudah tenaga pengangkut untuk melaksanakan pengosongan dan pembersihan TPS dari tempat sampah, adanya pemisahan antara sampah organik dengan sampah non-organik akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembuangan akhir sampah.

Masyarakat sebagai penghasil sampah mempunyai kemampuan untuk menekan biaya penanganan sampah kota

melalui beberapa tindakan dan kegiatan yang sederhana yang dapat dilakukan di tiap rumah tangga. Ketertiban dan kedisiplinan masyarakat didalam pembuangan sampah seperti memisahkan sampah basah dan sampah kering dan membuang sampah pada tempatnya (TPS) tidak berserakan. Upaya memperkecil pengelolaan sampah yang baik perlu melibatkan masyarakat sehingga akan didapatkan efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan sampah. Penanganan sampah yang buruk akan berdampak terjadinya perubahan iklim, hal ini terutama diakibatkan oleh kebakaran sampah, gas Metana (CH₄), pengaruh terhadap kesehatan berupa penyebaran penyakit menular, gangguan pernapasan akibat dari kualitas udara yang rendah dan lain sebagainya.

Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dipandang sebagai *beneficiary* pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari penilaian kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi program. Partisipasi sosial yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, melayat, nyambung dan mulang-sumbang. Berperan aktif dalam menciptakan dan menumbuhkan kehidupan ekonom, sosial, seni budaya dilingkungan masyarakat untuk menunjang perkembangan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase di Indonesia saat ini belum mencapai kondisi yang diinginkan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah di lingkungan permukiman padat penduduk, kumuh dan rawan sanitasi di perkotaan. Akses penduduk kepada prasarana dan sarana persampahan dan drainase pada dasarnya erat kaitannya dengan aspek

kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta kemiskinan. Hasil berbagai pengamatan dan penelitian telah membuktikan bahwa semakin besar akses penduduk kepada fasilitas prasarana dan sarana air limbah permukiman, persampahan dan drainase (serta pemahaman tentang hygiene) semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui media air (*waterborne diseases*).

Permasalahan lingkungan yang umum terjadi di perkotaan adalah pengelolaan sampah perkotaan yang kurang baik. Sampah yang merupakan bagian sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit. Pengelolaan sampah di Kabupaten Subang sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi. Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan (Moersid, 2004). Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbunan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan.

Sumber permasalahan sampah selalu hadir, baik di tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA), maupun saat pendistribusiannya. Berikut beberapa

faktor penyebab penumpukan sampah yaitu:

1. Volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya
2. Jarak TPA dan pusat sampah relatif jauh hingga waktu untuk mengangkut sampah kurang efektif.
3. Fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah. Sisa sampah di TPS berpotensi menjadi tumpukan sampah.
4. Teknologi pengolahan sampah tidak optimal sehingga lambat membusuk.
5. Tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah. Masyarakat sering membuang sampah di sembarang tempat sebagai jalan pintas.
6. Kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah serta produknya.
7. Minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengolahan sampah secara tepat.
8. Manajemen sampah tidak efektif.

Selanjutnya masalah yang sering timbul dalam penanganan sampah adalah tingginya tingkat pencemaran yang berasal dari sampah rumah tangga, pasar, rumah sakit, sekolah dan tempat-tempat umum lainnya. Tingginya tingkat pencemaran tersebut sebagai akibat makin padatnya penduduk dan makin meningkatnya aktivitas manusia sehingga volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat pula, sehingga terjadilah penumpukan sampah oleh karena volume sampah yang dapat di angkut dan di kelola tidak seimbang dengan volume produksi sampah. Penumpukan sampah tersebut tentunya mempunyai dampak yang negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga sangat diperlukan sistem pengelolaan persampahan yang memadai. Pelaksanaan pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi komponen-komponen yang mendukung yaitu aspek teknis, kelembagaan, hukum atau peraturan, pembiayaan maupun peran serta masyarakat. Apabila masyarakat

menyediakan atau menetapkan lokasi TPS/TPA dilahan mereka, tidak berarti persoalan sampah menjadi selesai karena pada suatu saat nanti masalah ini akan muncul kembali manakala lahan tersebut akan dimanfaatkan oleh pemilih lahan untuk kegiatan pembangunan pemukiman. Oleh karena itu diharapkan dalam jangka panjang justru diperlukan upaya pendekatan kepada Pemerintah Kabupaten Subang agar di daerah, khususnya di Kelurahan Cigadung dapat dilayani oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Tata Ruang Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten Subang. Dengan demikian maka masyarakat hanya diperlukan untuk menyediakan TPS sedangkan TA menjadi kewajiban pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan keinginan masyarakat dan dengan sukarela masyarakat menyediakan dan membangun lahan untuk TPS. Hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Tata Ruang Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten Subang, mengenai apakah yang dilakukan Dinas Tata Ruang Permukiman Dan Kebersihan Kabupaten Subang dalam pengelolaan sampah lingkungan : Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, Dinas berupaya dengan mengadakan pengarahan-pengarahan, pembuatan TPS baru atau renovasi TPS yang sudah ada di wilayah Kecamatan Subang dan pembagian roda untuk pengangkut sampah dari rumah-rumah ke TPS untuk setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Subang. Tapi pembuatan TPS dan pembagian roda sampah belum mencakup semua keluarahan di bagi, masih ada yang belum dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada.

Keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana fisik untuk memenuhi tingkat pelayanan sesuai peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan penduduk dari waktu ke waktu berkaitan dengan tata ruang kota dan memberikan dampak pada lingkungan seperti gangguan adanya lalat

dan estetika sehingga banyaknya TPS yang kondisinya mengganggu kenyamanan lingkungan masyarakat. Hasil wawancara penulis dengan Aparat Kelurahan Cigadung mengenai apakah di Kelurahan Cigadung sudah dibentuk organisasi untuk mengelola sampah lingkungan sebagai berikut : Masalah pengelolaan sampah khususnya di wilayah Kelurahan Cigadung, masyarakat belum ada yang membentuk organisasi yang secara khusus mengelola persampahan, sampai saat ini yang mengelola sampah baru dikelola oleh organisasi di tingkat RW, dari mulai pemungutan retribusi, penarikan sampah sampai mengangkut ke TPS. Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan dilihat dari partisipasi sosial, bahwa di Kelurahan Cigadung sampai saat ini belum ada yang membentuk kelompok swadaya masyarakat untuk mengelola persampahan secara khusus, saat ini yang mengelola persampahan baru di kelola oleh para Ketua RW dan petugas pengangkut sampah di tingkat RW. Menyangkut keterbatasan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam berperan serta selaku warga kota dan sekaligus penghasil sampah, yang memiliki hak dan kewajiban dalam menikmati serta mendukung pelayanan kota hal ini dengan sendirinya mengakibatkan rendahnya tingkat pelayanan perkotaan, sehingga sampah menumpuk akibat tidak terangkut.

Kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah mulai dari sumbernya adalah belum adanya persamaan persepsi dan sikap dalam pengelolaan sampah, sehingga perilaku yang muncul belum sesuai dengan model partisipasi yang akan diimplementasikan. Dalam persepsi masyarakat, kendala tersebut disebagai 'kesadaran warga kurang'. Kesadaran tersebut lebih merujuk pada persepsi dan sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Persepsi dan sikap yang dapat mempengaruhi perilaku, sehingga perubahan perilaku memerlukan upaya

perubahan persepsi dan sikap terlebih dahulu.

Dalam Partisipasi masyarakat terdapat motif sosial, ada dua sisi motif sosial yakni untuk memperoleh status sosial dan untuk menghindarkan dari terkena pengendalian sosial (*social control*). Orang akan dengan suka hati berpartisipasi di dalam suatu kegiatan pembangunan manakala keikutsertaannya itu akan membawa dampak meningkatnya status sosialnya. Pada sisi negatif orang akan terpaksa berpartisipasi dalam satu kegiatan pembangunan karena takut terkena sanksi sosial (tersisih atau dikucilkan oleh masyarakat). (Abu Huraerah, 2007 : 106). Motif semacam ini dikendalikan oleh norma-norma sosial yang masih kuat di dalam masyarakat, terutama yang masih bersifat paguyuban. Dalam hal ini persambungan yang kokoh antara lambang-lambang pembangunan dengan lambang-lambang yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa apabila keberhasilan pembangunan diukur pada seberapa besar masyarakat dapat merasakan manfaat dari perubahan yang terjadi maka peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam usaha meningkatkan kualitas hidup. Pada tingkat yang lebih dinamis, peran serta masyarakat dapat diwujudkan sebagai suatu proses penggerakan masyarakat untuk menentukan tujuan pembangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi Buah Pikiran
Partisipasi masyarakat dalam partisipasi buah pikiran belum terlaksana, perancangan belum melibatkan masyarakat, tetapi hanya di

wakili oleh Ketua RW dan Pihak Kelurahan yang membahas tentang program pengelolaan sampah di masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Cigadung yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan persampahan dengan melakukan pemetaan kondisi TPS yang ada masyarakat, masalah yang mereka hadapi serta kebutuhan memecahkan masalah persampahan secara cepat dan dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat setempat.

2. Partisipasi Tenaga
Dengan pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat, partisipasi tenaga berupa gotong royong semua dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat secara bergotong royong untuk mewujudkan kelurahan Cigadung dapat melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah lingkungan masyarakat guna mengembangkan tingkat pola hidup sehat di masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesehatan, sehingga Kelurahan Cigadung dapat menjadi kelurahan yang kondisi lingkungan sehat.
3. Partisipasi Harta Benda
Partisipasi harta benda yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Cigadung untuk mendukung pengembangan pengelolaan sampah masih ada yang kurang mendukung dengan program tersebut, terbukti dari hasil wawancara tersebut, bahwa masyarakat Kelurahan Cigadung masih ada yang tidak mau merelakan harta bendanya, berupa membayar retribusi sampah, itu diperlihatkan tidak semua wilayah rukun warga target retribusinya tercapai.
4. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran
Partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang

bersangkutan antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat. Kesiadaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri.

5. Partisipasi Sosial

Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan sampah masih terdapat kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah mulai dari sumbernya adalah belum adanya persamaan persepsi dan sikap dalam pengelolaan sampah, sehingga perilaku yang muncul belum sesuai dengan model partisipasi yang akan diimplementasikan. Dalam persepsi masyarakat, kendala tersebut disebabkan 'kesadaran warga kurang'. Kesadaran tersebut lebih merujuk pada persepsi dan sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Persepsi dan sikap yang dapat mempengaruhi perilaku, sehingga perubahan perilaku memerlukan upaya perubahan persepsi dan sikap terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboejoewono, A. 2005. *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*; Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus. Jakarta
- Adi Fahrudin, 2010, *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*, Humaniora, Bandung
- Antonius Mintorogo, 2004, *Pengantar Ilmu Administrasi*, STIA LAN PRESS
- Budi Puspo, 2007, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Denhardt, & Denhardt,. 2004. *The New Public Service: Serving, Not*

- Steering*. (New York: M.E. Sharpe).
- Gelbert M, Prihanto D, dan Suprihatin A, 2006. *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC, Malang
- Hadiwiyoto, S. 2003. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Kartikawan, Yudhi. 2007. "Pengelolaan Persampahan." *Jurnal Lingkungan Hidup*. Yogyakarta
- Kodoatie, Robert, 2005. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Lexy J. Meloeng, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Parwoto, MDS, 2007. *Pembangunan Partisipatif*. Makalah pada Loka karya Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Pemukiman, BKSNI. Jakarta
- Santoso, Nurman. 2000. *Pendidikan di Indonesia (Dari Masa ke Masa)*. Jakarta: Haji Masagung
- Sastroputro, S. 2008. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni
- Slamet, Y. 2004. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: UNS Press
- Soelaiman Holil. 2005. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Subekti, Sri. 2009. "Pengelolaan sampah rumah tangga 3r berbasis masyarakat Pendahuluan." Available at: <http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektihadini>
- Sudarsono, 2003, *Beberapa Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Sutarto, 2002, *Dasar-Dasar Organisasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Tchobanoglous, 1993. *Integrated Solid Waste Management*. Mc. Graw Hill: Kogakusha, Ltd
- Walgito, Bimo. 1999. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Andi, Yogyakarta
- Wibisono, C. 2002. *Anatomi dan Profil Konglomerat Bisnis Indonesia*. Management dan Usahawan Indonesia